

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN
KARANGASEM**

I Made Pradana Adiputra
Universitas Pendidikan Ganesha
adiputraundiksha@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan flypaper effect pada belanja daerah dalam pemerintahan Kabupaten Karangasem, dan untuk menentukan pajak pendapatan daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan pendapatan lain yang sah pada PAD Kabupaten Karangasem di 2011- 2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum dan pendapatan Asli Daerah sebagai variabel independen (independent) dan belanja daerah yang ditunjukkan oleh APBD sebagai variabel dependen (tergantung). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis proporsi, Statistik Deskriptif - Crosstab, dan Trend Teknik analisis Least Square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 6 (enam) tahun 2005-2010 DAU dan PAD hanya memberikan kontribusi pada tahun 2005 dan 2006, karena pada tahun depan, 2007-2010 persentase kontribusi DAU dan PAD kurang dari rata-rata kontribusi persentase (0,69%). Selama periode 2005-2010, penelitian tidak menemukan fenomena flypaper effect. Adapun prediksi sumber pendapatan dari pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan dari 2011-2015, diperkirakan akan terus meningkat dan diharapkan dapat membantu promosi pendapatan daerah di Kabupaten Karangasem untuk menjadi wilayah berpemerintahan sendiri sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah.

Keyword: Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, regional Pendapatan Asli, Belanja Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the possibility of flypaper effect on regional expenditure in the government of Karangasem regency, and to determine the regional tax revenue, regional retribution, regional operating income and other legitimate incomes on the PAD of Karangasem regency in 2011-2015. The variables used in this study were the general allocation fund and regionally generated revenue as independent variables (independent) and regional expenditure which was proxied by APBD as a dependent variable (dependent). Data collection methods used in this study were observation and documentation. The data analysis techniques used were the proportion analysis technique, Descriptive Statistics - Crosstab, and Analysis technique Trend Least



Jurnal Ilmiah Akuntansi
dan Humanika
JINAH
Volume 3
Nomor 2
Singaraja, Juni 2014
ISSN 2089-3310

Square.

The results showed that over a period of 6 (six) years from 2005 to 2010 DAU and PAD merely contributed in 2005 and 2006, due in the next year, from 2007 to 2010 the percentage of contribution DAU and PAD is less than the contribution average percentage (0,69%). During the period of 2005-2010, the research did not find any flypaper effect phenomenon. As for the prediction of revenue sources of regional revenue for the next five years from 2011-2015, it is predicted to continue to rise and expected to help the promotion of regional revenues in Karangasem regency in order to become a self-governing territory in accordance with Law No.32 of 2004 on Autonomy areas.

Keyword : Flypaper Effect, General Allocation Fund, Regionally Generated Revenue, Regional Expenditure

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik et al, 2002).

Dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), lain – lain pendapatan yang sah dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah.

Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera sebelumnya telah diteliti dan hasil analisisnya adalah PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti telah terjadi *flypaper effect* (Maimunah, 2006). Selanjutnya Widodo (2007) meneliti pengeluaran daerah di Kabupaten/Kota di Bali dengan fokus pada terjadinya *flypaper effect*. Dalam penelitiannya menemukan adanya *Flypaper effect* pada tahun 2003, sedangkan pada tahun 2001, 2002, 2004, dan 2005 tidak ditemukan adanya *flypaper effect*. Ini memberi arti bahwa pada tahun 2003 yang dominan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD) adalah Dana Alokasi Umum (DAU) bukan Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Sedangkan pada tahun 2001, 2002, 2004, dan 2005 yang dominan berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan Dana Alokasi Umum (DAU).

Maimunah (2006) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD. Saputra (2011) meneliti kontribusi sumber-sumber penerimaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali. Dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa Pajak Daerah berkontribusi paling tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat diprediksikan Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Laba Usaha Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan secara terus menerus tetapi Lain – lain Pendapatan Yang Sah mengalami penurunan.

Di Kabupaten Karangasem, transfer Pemerintah Pusat dioptimalkan sebagai potensi pendapatan yang dimiliki untuk memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah, berdasarkan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem 6 (enam) tahun terakhir yaitu 25,3 % dan angka tersebut lebih kecil dibandingkan Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Karangasem diantaranya Kabupaten Klungkung 31,62 %, Kabupaten Bangli 26,25 %, dan Kabupaten Buleleng sebesar 33,36%. Dapat dilihat pada tabel 2 yaitu Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Karangasem periode 2005 – 2010 dimana prosentase penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem. Bantuan pemerintah pusat dan provinsi masih sangat diharapkan dalam menutupi sebagian besar pengeluaran pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten Karangasem masih harus bekerja keras dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, untuk mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, yaitu mampu meningkatkan kemandirian daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh karena itu nampaknya sangatlah penting untuk menganalisis “*Flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem”.

Untuk dapat memberikan gambaran umum tentang perkembangan APBD Propinsi Bali 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat dalam tabel 1 :

Tabel 1
 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah
 (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU)
 Provinsi Bali Periode 2005-2010

Tahun	APBD Bali (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Dana Alokasi Umum (DAU) (Rp)
2005	7.665.562.000.752	742.886.074.752	199.924.000.000
2006	6.082.644.159.000	729.338.159.745	353.306.000.000
2007	9.218.922.057.000	834.475.057.579	384.449.000.000
2008	8.503.641.419.036	1.055.454.263.032	448.187.419.000
2009	9.856.735.788.000	1.163.947.552.768	471.788.221.000
2010	10.927.115.176.805	1.401.997.080.176	489.942.535.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Bali dan Dinas Pendapatan Provinsi Bali.

Berdasarkan tabel 1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bali dapat dikatakan sudah mandiri dan sesuai dengan otonomi daerah dilihat dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Provinsi Bali dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Provinsi Bali. Namun tidak semua Kabupaten di Bali memberikan kontribusi yang sama besar terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai jumlah yang tertera pada tabel 1.

Salah satu kabupaten di Bali yang prosentase PAD nya masih kecil adalah Kabupaten Karangasem. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia mengindikasikan belum mandirinya kabupaten di wilayah timur Bali ini dilihat dari faktor ekonomi. Realisasi APBD Kabupaten Karangasem 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU),
Kabupaten Karangasem Periode 2005 – 2010

Tahun	APBD Kabupaten Karangasem (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	Dana Alokasi Umum (DAU) (Rp)	Dana Alokasi Umum (DAU) (%)
		Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan (Rp)	Lain – lain PAD yang sah (Rp)			
2005	283.202.089.998	12.733.783.907	4.201.015.582	3.248.946.676	3.725.845.032	0,084 %	180.482.000.000	0,637 %
2006	395.961.738.998	14.050.025.000	4.669.200.040	4.108.989.573	3.204.000.000	0,066 %	286.423.000.000	0,723 %
2007	535.210.808.726	16.268.023.424	4.984.409.044	4.430.795.654	7.944.263.538	0,063 %	313.036.000.000	0,585 %
2008	612.126.712.573	23.288.118.936	6.743.202.271	5.307.755.443	7.666.749.870	0,070 %	349.814.538.000	0,571 %
2009	612.417.552.710	27.879.148.834	7.376.860.916	6.600.712.881	5.986.237.249	0,078 %	356.681.483.000	0,582 %
2010	630.411.610.199	32.044.199.000	7.991.610.110	7.143.936.023	5.347.608.000	0,086 %	371.641.120.000	0,590 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Bali dan Dinas Pendapatan Provinsi Bali

Berdasarkan Tabel 2, Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertera pada tabel lebih besar dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem. Jika diprosentasekan perbandingan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari Dana Perimbangan lebih besar dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Kabupaten Karangasem sebesar 0,132 %. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem berdasarkan tabel 2 ternyata sampai tahun 2010 belum mampu mencapai angka prosentase 0,1 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Karangasem dalam laju pertumbuhan ekonomi daerahnya masih memiliki prosentase paling kecil dan masih sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dengan berdasarkan uraian tersebut diatas dan data berdasarkan tabel 2 tersebut diatas maka dalam penelitian ini akan menganalisis adanya *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Belanja Daerah

Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu. Pendapatan daerah itu bisa berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Halim (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber PAD terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wewenang pungutan pajak daerah berada di tangan pemerintah daerah.

Menurut UU No 28 Tahun 2009, pajak yang dikelola daerah ada dua jenis:

a) Pajak provinsi, terdiri dari:

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok.

b) Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung wallet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah ada tiga, yaitu:

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
3. Retribusi perizinan usaha adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

1. Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

3. Jasa giro
4. Bunga deposito
5. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
6. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
9. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
10. Pendapatan dari pengembalian
11. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
12. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
13. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.3 Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil (Mardiasmo, 2004).

Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Widodo, 2007) :

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang – kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Dana Alokasi UMUM (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing – masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan di atas.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- 4) Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2.4 *Flypaper Effect* dalam Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

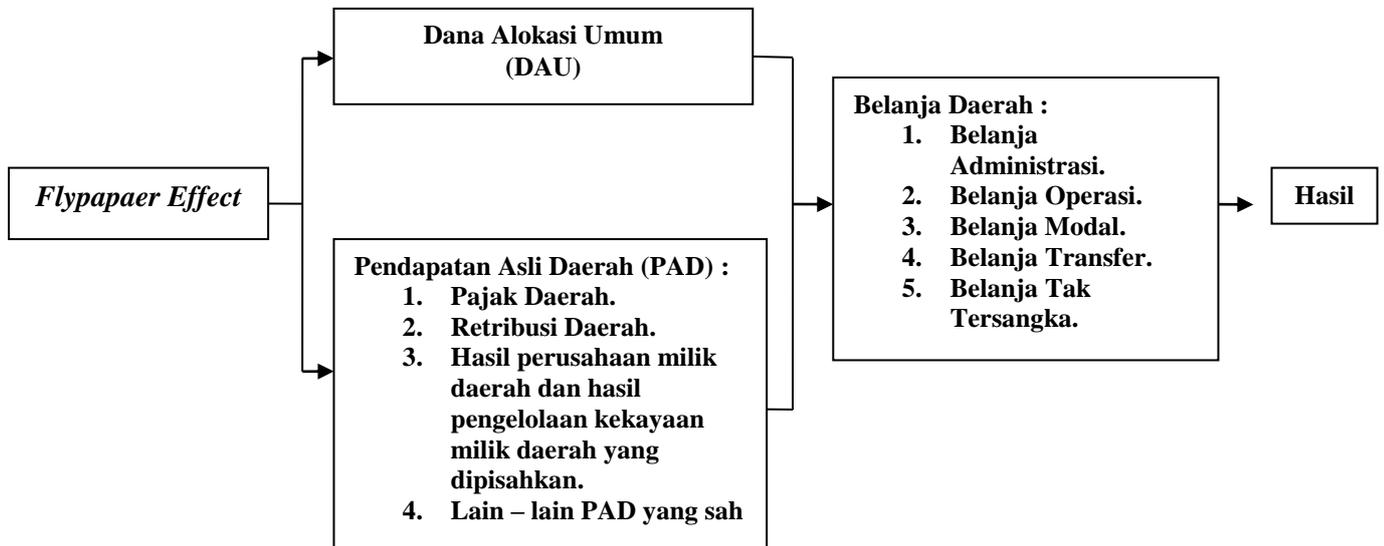
Pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan dari teori perilaku konsumen. Wilde dalam Hastuti (2011) memelopori analisis transfer ke dalam format kendala anggaran dan kurva indiferensiasi. Transfer bersyarat (*conditional grants*) berpengaruh pada konsumsi barang privat melalui efek harga. Bantuan bersyarat, misalnya transfer penyeimbang tidak terbatas (*open-ended matching grants*), akan menurunkan harga barang publik. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik. Pengaruh transfer bersyarat pada konsumsi barang privat tergantung pada sensitivitas silangnya. Jika, harga barang publik yang lebih rendah akan meningkatkan konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah telah menurunkan tarif pajak. Dengan adanya hal tersebut, maka kenaikan transfer sebagian berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik dan sebagian lagi pada konsumsi barang privat secara tidak langsung melalui penurunan tarif pajak.

Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull dalam Hastuti, 2011)). Fenomena *flypaper effect* ini dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko dalam Hastuti, 2011). Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Maimunah (2006) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD. Ia juga meneliti bahwa *Flypaper Effect* berpengaruh untuk memprediksi belanja daerah periode kedepan dan juga tidak terdapat perbedaan terjadinya *Flypaper Effect* baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi.

III. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk dapat mengetahui kerangka pemikiran dalam penelitian *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem, dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem

Sumber : Data Diolah, 2014

IV. HIPOTESIS PENELITIAN

- H1 : Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi terhadap Belanja Daerah (BD) di Kabupaten Karangasem.
- H2 : Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD) lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) di Kabupaten Karangasem.
- H3 : Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah, dan Lain – lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karangasem Tahun 2011 – 2015.

V. METODE PENELITIAN

5.1 Tempat dan Objek Penelitian

- a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Karangasem.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Data tersebut berupa realisasi Belanja Daerah (BD), realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.2 Identifikasi Variabel

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Variabel bebas (*independent variable*) yaitu DAU dan PAD.
- b. Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Belanja Daerah

5.3 Definisi Operasional Variabel

a. Variabel bebas (*independent variable*).

Dalam penelitian ini variabel bebas (*independent*) yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjanya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu :

- a). Pajak Daerah.
- b). Retribusi Daerah.
- c). Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
- d). Lain – lain PAD yang sah.

b. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) yang digunakan adalah Belanja Daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

c. *Flypaper Effect*

Flypaper Effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/*grants* atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau *unconditional grants* daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah.

5.4 Jenis Data

- a. Penelitian ini menggunakan Data Kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka yang dapat dinyatakan dan diukur dengan satuan hitung atau data kualitatif yang diangkakan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem. Data yang digunakan yaitu Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem meliputi total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2005 – 2010.
- b. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah pihak lain seperti data – data mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bali dan Situs Sistem Informasi Keuangan Daerah, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

5.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data sehubungan dengan penelitian ini adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem

5.6 Teknik Analisis Data

a. Teknik Analisis Proporsi

Untuk menganalisis kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) dapat digunakan analisis Proporsi, yang diformulasikan sebagai berikut :

$$p \text{ (kontribusi)} = \frac{X_i}{X} \times 100\%$$

Dimana :

X_i = Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah

X = Belanja Daerah

b. Statistik Deskriptif

Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum lebih besar terhadap Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, digunakan Analisis *Crosstab* (tabulasi silang). Dengan ketentuan jika Asymp. Sig (2-sided) Linear-by-Linear Association $> \alpha$ (0.05), maka tidak terjadi *flypaper effect* dan jika Asymp. Sig (2-sided) Linear-by-Linear Association $< \alpha$ (0.05), maka terjadi *flypaper effect*.

c. Teknik Analisis *Trend Least Square*

Analisis *trend least Square* merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang yang diformulasikan sebagai berikut : (Wirawan,2002)

$$Y_i = \alpha + \beta X_i$$

Dimana :

Y_i = Variabel terikat (kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah).

α = Konstanta

β = Koefisien korelasi regresi (Trend)

X_i = Waktu

Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Analisis *trend least square* digunakan untuk mengetahui prediksi potensi realisasi sumber – sumber penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun dimulai periode 2011 sampai dengan periode 2015. Dalam analisis ini digunakan data realisasi pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain – lain PAD yang sah selama 6 (enam) tahun dimulai periode 2005 sampai dengan periode 2010.

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6.1 Hasil Penelitian

1. Analisis Proporsi

Untuk mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten Karangasem digunakan Analisis Proporsi yang diformulasikan dengan X_i (DAU dan PAD), X (Belanja Daerah) dikalikan 100 %. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem Tahun 2005-2010

Tahun	PAD dan DAU (Rp)	APBD (Rp)	Kontribusi
2005	204.391.591.198	283.202.089.998	0,72 %
2006	312.455.214.613	395.961.738.998	0,79 %
2007	346.663.491.660	535.210.808.726	0,65 %
2008	392820.365.000	612.126.712.573	0,64 %
2009	404.524.442.880	612.417.552.710	0,66%
2010	424.168.473.133	630.411.610.199	0,67 %
			4,13 %

Sumber : Data Diolah

2. Statistik Deskriptif – *Crosstab*

Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum lebih besar terhadap Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah atau tidak terjadi fenomena *flypaper effect*, dilakukan dengan Tabulasi silang atau *Crosstab* yang penyajiannya berupa data kualitatif khususnya yang berskala nominal. Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar terhadap Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah diuji dengan Analisis *Crosstabs* seperti pada tabel 4 dan tabel 5.

Tabel 4

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	30.000 ^a	25	.224
Likelihood Ratio	21.501	25	.664
Linear-by-Linear Association	4.276	1	.039
N of Valid Cases	6		

a. 36 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah menunjukkan *Value Linear-by-Linear Association* 4.276 dengan nilai Asymp. Sig (2-sided) $0.039 < \alpha$ (0.05).

Tabel 5

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	30.000 ^a	25	.224
Likelihood Ratio	21.501	25	.664
Linear-by-Linear Association	4.683	1	.030
N of Valid Cases	6		

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	30.000 ^a	25	.224
Likelihood Ratio	21.501	25	.664
Linear-by-Linear Association	4.683	1	.030
N of Valid Cases	6		

a. 36 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah menunjukkan *Value Linear-by-Linear* 4.683 dengan nilai Asymp. Sig (2-sided) $0.030 < \alpha (0.05)$.

3. Analisis *Trend Least Square*

Untuk meramalkan potensi realisasi sumber-sumber penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dari 2011-2015 digunakan Analisis *Trend Least Square*, dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Prediksi Penerimaan Pajak Daerah
Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Daerah (Yi)	Xi	Xi ²	XiYi
2005	Rp. 12.733.783.907	-5	25	Rp. -63.668.919.535
2006	Rp. 14.050.025.000	-3	9	Rp. -42.150.075.000
2007	Rp. 16.268.023.424	-1	1	Rp. -16.268.023.424
	0	0	0	0
2008	Rp. 23.288.118.936	1	1	Rp. 23.288.118.936
2009	Rp. 27.879.148.834	3	9	Rp. 83.637.446.502

2010	Rp. 32.044.199.000	5	25	Rp. 160.220.995.000
	Rp. 126.263.299.101		70	Rp. 145.059.542.479

Sumber : Data Diolah

$$\begin{aligned}
 a. &= \frac{\sum Y_i}{n} \\
 &= \frac{\text{Rp. 126.263.299.101}}{6} \\
 &= \text{Rp. 21.043.883.184}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b. &= \frac{\sum X_i Y_i}{\sum X_i^2} \\
 &= \frac{\text{Rp. 145.059.542.479}}{70} \\
 &= \text{Rp. 2.072.279.178}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Trend untuk tahun 2011 : } Y &= \text{Rp. 21.043.883.184} + \text{Rp. 2.072.279.178 (3)} \\
 &= \text{Rp. 69.348.487.086}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Trend untuk tahun 2012 : } Y &= \text{Rp. 21.043.883.184} + \text{Rp. 2.072.279.178 (4)} \\
 &= \text{Rp. 92.464.649.448}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Trend untuk tahun 2013 : } Y &= \text{Rp. 21.043.883.184} + \text{Rp. 2.072.279.178 (5)} \\
 &= \text{Rp. 115.580.811.810}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Trend untuk tahun 2014 : } Y &= \text{Rp. 21.043.883.184} + \text{Rp. 2.072.279.178 (6)} \\
 &= \text{Rp. 138.696.974.172}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Trend untuk tahun 2015 : } Y &= \text{Rp. 21.043.883.184} + \text{Rp. 2.072.279.178 (7)} \\
 &= \text{Rp. 161.813.136.534}
 \end{aligned}$$

Dari analisis tersebut diatas maka proyeksi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karangasem lima tahun yang akan datang menunjukkan adanya peningkatan yang terus menerus.

Tabel 7
 Prediksi Penerimaan Retribusi Daerah
 Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Retribusi Daerah (Yi)	Xi	Xi ²	XiYi
2005	Rp. 4.201.015.582	-5	25	Rp. -21.005.077.910
2006	Rp. 4.669.200.040	-3	9	Rp. -14.007.600.120
2007	Rp. 4.984.409.044	-1	1	Rp. -4.984.409.044
	0	0	0	0
2008	Rp. 6.743.202.271	1	1	Rp. 6.743.202.271
2009	Rp. 7.376.860.916	3	9	Rp. 22.130.582.748
2010	Rp. 7.991.610.110	5	25	Rp. 39.958.050.550
	Rp. 35.966.297.963		70	Rp. 28.834.748.495

Sumber : Data Diolah

$$\begin{aligned}
 \text{a.} &= \frac{\sum Y_i}{n} \\
 &= \frac{\text{Rp. } 35.966.297.963}{6} \\
 &= \text{Rp. } 5.994.382.994
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b.} &= \frac{\sum X_i Y_i}{\sum X_i^2} \\
 &= \frac{\text{Rp. } 28.834.748.495}{70} \\
 &= \text{Rp. } 411.924.979
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Trend untuk tahun 2011 : Y} &= \text{Rp. } 5.994.382.994 + \text{Rp. } 411.924.979 \text{ (3)} \\ &= \text{Rp. } 19.218.923.919 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Trend untuk tahun 2012 : Y} &= \text{Rp. } 5.994.382.994 + \text{Rp. } 411.924.979 \text{ (4)} \\ &= \text{Rp. } 25.625.231.892 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Trend untuk tahun 2013 : Y} &= \text{Rp. } 5.994.382.994 + \text{Rp. } 411.924.979 \text{ (5)} \\ &= \text{Rp. } 32.031.539.865 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Trend untuk tahun 2014 : Y} &= \text{Rp. } 5.994.382.994 + \text{Rp. } 411.924.979 \text{ (6)} \\ &= \text{Rp. } 38.437.847.838 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Trend untuk tahun 2015 : Y} &= \text{Rp. } 5.994.382.994 + \text{Rp. } 411.924.979 \text{ (7)} \\ &= \text{Rp. } 44.844.155.811 \end{aligned}$$

Dari analisis tersebut diatas maka proyeksi penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Karangasem lima tahun yang akan datang menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik.

Tabel 8
Prediksi Penerimaan Laba Usaha Daerah
Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Labas Usaha Daerah (Yi)	Xi	Xi ²	XiYi
2005	Rp. 3.248.946.676	-5	25	Rp. -16.244.733.380
2006	Rp. 4.108.989.573	-3	9	Rp. -12.326.968.719
2007	Rp. 4.430.795.654	-1	1	Rp. -4.430.795.654
	0	0	0	0
2008	Rp. 5.307.755.443	1	1	Rp. 5.307.755.443
2009	Rp. 6.600.712.881	3	9	Rp. 19.802.138.643
2010	Rp. 7.143.936.023	5	25	Rp. 39.958.050.550
	Rp. 31.688.810.337		70	Rp. 32.065.446.883

Sumber : Data Diolah

$$a. = \frac{\sum Y_i}{n}$$

$$= \frac{\text{Rp. 31.688.810.337}}{6}$$

$$= \text{Rp. 5.281.468.390}$$

$$\text{b. } = \frac{\sum X_i Y_i}{\sum X_i^2}$$

$$= \frac{\text{Rp. 32.065.446.883}}{70}$$

$$= \text{Rp. 458.077.813}$$

$$\text{Trend untuk tahun 2011 : Y} = \text{Rp. 5.281.468.390} + \text{Rp. 458.077.813 (3)}$$

$$= \text{Rp. 17.218.638.609}$$

$$\text{Trend untuk tahun 2012 : Y} = \text{Rp. 5.281.468.390} + \text{Rp. 458.077.813 (4)}$$

$$= \text{Rp. 22.958.184.812}$$

$$\text{Trend untuk tahun 2013 : Y} = \text{Rp. 5.281.468.390} + \text{Rp. 458.077.813 (5)}$$

$$= \text{Rp. 28.697.731.015}$$

$$\text{Trend untuk tahun 2014 : Y} = \text{Rp. 5.281.468.390} + \text{Rp. 458.077.813 (6)}$$

$$= \text{Rp. 34.437.277.218}$$

$$\text{Trend untuk tahun 2015 : Y} = \text{Rp. 5.281.468.390} + \text{Rp. 458.077.813 (7)}$$

$$= \text{Rp. 40.176.823.421}$$

Dari hasil analisis diatas maka proyeksi penerimaan Laba Usaha Daerah di Kabupaten Karangasem lima tahun yang akan datang menunjukkan adanya peningkatan terus – menerus.

Tabel 9
 Prediksi Penerimaan Lain – lain Pendapatan Yang Sah
 Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Yi)	Xi	Xi ²	XiYi
2005	Rp. 3.725.845.032	-5	25	Rp. -18.629.225.160
2006	Rp. 3.204.000.000	-3	9	Rp. -9.612.000.000
2007	Rp. 7.944.263.538	-1	1	Rp. -7.944.263.538
	0	0	0	0
2008	Rp. 7.666.749.870	1	1	Rp. 7.666.749.870
2009	Rp. 5.986.237.249	3	9	Rp. 17.958.711.747
2010	Rp. 5.347.608.000	5	25	Rp. 26.738.040.000
	Rp. 33.874.703.689		70	Rp. 16.178.012.919

Sumber : Data Diolah

$$\begin{aligned}
 \text{a. } &= \frac{\sum Y_i}{n} \\
 &= \frac{\text{Rp. } 33.874.703.689}{6} \\
 &= \text{Rp. } 5.645.783.948
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. } &= \frac{\sum X_i Y_i}{\sum X_i^2} \\
 &= \frac{\text{Rp. } 16.178.012.919}{70} \\
 &= \text{Rp. } 231.114.470
 \end{aligned}$$

Trend untuk tahun 2011 : Y = Rp. 5.645.783.948 + Rp. 231.114.470 (3)
= Rp. 17.630.695.254

Trend untuk tahun 2012 : Y = Rp. 5.645.783.948 + Rp. 231.114.470 (4)
= Rp. 23.507.593.672

Trend untuk tahun 2013 : Y = Rp. 5.645.783.948 + Rp. 231.114.470 (5)
= Rp. 29.384.492.090

Trend untuk tahun 2014 : Y = Rp. 5.645.783.948 + Rp. 231.114.470 (6)
= Rp. 35.261.390.508

Trend untuk tahun 2015 : Y = Rp. 5.645.783.948 + Rp. 231.114.470 (7)
= Rp. 41.138.288.926

Dari analisis tersebut diatas maka proyeksi penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah di Kabupaten Karangasem untuk lima tahun yang akan datang menunjukkan adanya peningkatan.

Tabel 10
Prediksi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Yi)	Xi	Xi ²	XiYi
2005	Rp. 23.909.591.198	-5	25	Rp. -199.547.955.990
2006	Rp. 26.032.214.613	-3	9	Rp. -78.096.643.839
2007	Rp. 33.627.491.660	-1	1	Rp. -33.627.491.660
	0	0	0	0
2008	Rp. 43.005.827.000	1	1	Rp. 43.005.827.000
2009	Rp. 47.842.959.880	3	9	Rp. 143.528.879.640
2010	Rp. 52.527.353.133	5	25	Rp. 262.636.765.665
	Rp. 226.945.437.484		70	Rp. 217.899.380.816

Sumber : Data Diolah

$$\begin{aligned}
 \text{a.} &= \frac{\sum Y_i}{n} \\
 &= \frac{\text{Rp. 226.945.437.484}}{6} \\
 &= \text{Rp. 37.824.239.581}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b.} &= \frac{\sum X_i Y_i}{\sum X_i^2} \\
 &= \frac{\text{Rp. 217.899.380.816}}{70} \\
 &= \text{Rp. 3.112.848.297}
 \end{aligned}$$

Trend untuk tahun 2011 : Y	= Rp. 37.824.239.581 + Rp. 3.112.848.297 (3)
	= Rp. 122.811.263.634
Trend untuk tahun 2012 : Y	= Rp. 37.824.239.581 + Rp. 3.112.848.297 (4)
	= Rp. 163.748.351.512
Trend untuk tahun 2013 : Y	= Rp. 37.824.239.581 + Rp. 3.112.848.297 (5)
	= Rp. 204. 685.439.390
Trend untuk tahun 2014 : Y	= Rp. 37.824.239.581 + Rp. 3.112.848.297 (6)
	= Rp. 245.622.527.268
Trend untuk tahun 2015 : Y	= Rp. 37.824.239.581 + Rp. 3.112.848.297 (7)
	= Rp. 286.559.615.146

Dari hasil analisis diatas maka prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karangasem di masa yang akan datang mengalami peningkatan terus menerus.

6.2 Pembahasan

1. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem.

Dari hasil analisis proporsi untuk mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem

selama 6 (enam) tahun mulai periode tahun 2005 – 2010, didapatkan rata – rata kontribusi sebesar 0,69 %. PAD dan DAU dikatakan berkontribusi terhadap Belanja Daerah jika nilai prosentase kontribusi lebih besar dari rata – rata kontribusi, yaitu sebesar 0,69 %. PAD dan DAU berkontribusi di tahun 2005 sebesar 0,72 % dengan total APBD sebesar Rp. 283.202.089.998 dan di tahun 2006 berkontribusi sebesar 0,79 % dengan total APBD sebesar Rp. 395.961.738.998.

Saputra (2011) dalam penelitiannya yang menggunakan teknik analisis proporsi mendapatkan hasil dimana Pajak Daerah berkontribusi paling tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Bali. Secara garis besar Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah cenderung akan selalu berkontribusi terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian ini kontribusi paling tinggi terjadi di tahun 2006 sebesar 0,79 %. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang diperlukan kinerja yang maksimal dari pemerintah daerah dalam mengelola sumber – sumber penerimaan daerah serta sumber daya manusia yang optimal.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem.

Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah dalam penelitian ini diuji menggunakan Analisis Statistik Deskriptif – *Crosstab*. Berdasarkan tabel 6.1 dan tabel 6.2 diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh lebih besar (0.39) dari pada Dana Alokasi Umum (DAU) (0.30). Pada penelitian sebelumnya Maimunah (2006) dalam penelitiannya yang dilakukan di Pulau Sumatera menyatakan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* dalam merespon belanja transfer DAU dan PAD di Pulau Sumatera dengan menggunakan teknik analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Widodo (2007) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten/Kota di Bali dengan menggunakan teknik analisis uji asumsi klasik, regresi sederhana dan berganda menemukan adanya *Flypaper effect* pada tahun 2003 saja. Sedangkan pada tahun 2001, 2002, 2004, dan 2005 tidak ditemukan adanya *flypaper effect*.

Dalam penelitian sekarang yang dilakukan di Kabupaten Karangasem setelah di uji menggunakan teknik analisis statistik diskriptif-crosstab selama periode tahun 2005-2010 maka diperoleh hasil dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar terhadap Belanja Daerah daripada Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah sesuai hasil yang dilihat dari hubungan antar variabel pada nilai *Linear-by-*

Linear Association Pendapatan Asli Daerah sebesar $0.039 < \alpha (0.05)$ dan nilai *Linear-by-Linear Association* Dana Alokasi Umum sebesar $0.030 < \alpha (0.05)$. Dalam penelitian ini jika nilai *Linear-by-Linear Association* $< \alpha (0.05)$ maka terjadi *flypaper effect*, fenomena *flypaper effect* terjadi jika Dana Alokasi umum lebih besar terhadap Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Namun dari uji analisis didapatkan hasil yaitu Dana Alokasi Umum tidak lebih besar terhadap Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dengan kata lain tidak terjadi *flypaper effect*.

Dengan hasil yang didapat bahwasannya pengaruh Pendapatan Asli Daerah lebih besar terhadap Belanja Daerah daripada Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah maka dapat dikatakan tujuan pemerintah pusat memberikan transfer, khususnya Dana Alokasi Umum dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama melalui peningkatan sumber – sumber penerimaan daerah sebagai suatu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Dengan kata lain fenomena *flypaper effect* tidak terjadi pada periode tahun 2005 – 2010 di Kabupaten Karangasem. Tidak terjadinya *flypaper effect* di Kabupaten Karangasem periode tahun 2005-2010 juga dikuatkan dengan penerimaan Pajak Daerah yang terus meningkat dari tahun 2005-2010 dalam tabel 2, yang secara langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karangasem dan secara geografis Kabupaten Karangasem memiliki luas lahan kering seluas 76.912 Ha atau 91,61% yang dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, baik itu lahan parkir untuk objek wisata dan lahan untuk bercocok tanam buah-buahan dimana Kabupaten Karangasem terkenal dengan buah salaknya.

3. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015.

Dalam penelitian sebelumnya prediksi penerimaan sumber-sumber penerimaan daerah di Propinsi Bali telah diuji dengan teknik analisis *trend least square* oleh Saputra (2011) dan hasilnya untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat diprediksikan Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Laba Usaha Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan secara terus menerus tetapi Lain – lain Pendapatan Yang Sah mengalami penurunan.

Prediksi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karangasem lima tahun kedepan (2011-2015) dalam penelitian sekarang diuji menggunakan analisis *Trend Least Square* yang hasilnya untuk lima tahun mendatang (2011-2015) sumber – sumber penerimaan daerah mengalami peningkatan secara terus menerus yang secara langsung meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karangasem.

Hasil analisis menunjukkan proyeksi penerimaan Pajak Daerah untuk lima tahun mendatang dimulai dari tahun 2011 sebesar Rp.69.348.487.086, meningkat sebesar Rp.92.464.649.448 di tahun 2012, pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp.115.580.811.810, di tahun 2014 sebesar Rp.138.696.974.172, dan meningkat sebesar Rp.161.813.136.534 di tahun 2015. Untuk prediksi penerimaan Retribusi Daerah lima tahun yang akan datang juga mengalami peningkatan yang terus menerus, di tahun 2011 sebesar Rp.19.218.923.919. Pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp.25.625.231.892, kemudian di tahun 2013 sebesar Rp.32.031.539.865, pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp.38.437.847.838, dan di tahun 2015 sebesar Rp.44.844.155.811.

Prediksi penerimaan Laba Usaha Daerah juga mengalami peningkatan secara terus menerus untuk lima tahun yang akan datang. Di tahun 2011 proyeksi penerimaan Laba Usaha Daerah sebesar Rp.17.218.638.609, meningkat sebesar Rp.22.958.184.812 di tahun 2012, pada tahun 2013 sebesar Rp.28.697.731.015, kemudian meningkat menjadi Rp.34.437.277.218 di tahun 2014, dan pada tahun 2015 sebesar Rp.40.176.823.421. Begitu pula pada prediksi penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah untuk lima tahun mendatang juga mengalami peningkatan secara terus menerus, dimulai pada tahun 2011 proyeksi penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp. 17.630.695.254, pada tahun 2012 sebesar Rp. 23.507.593.672, lalu meningkat sebesar Rp.29.384.492.090 di tahun 2013, pada tahun 2014 sebesar Rp.35.261.390.508, dan meningkat sebesar Rp.41.138.288.926 di tahun 2015.

VII. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum selama periode tahun 2005-2010 rata-rata berkontribusi sebesar 0,69 %. Di tahun 2005 PAD dan DAU berkontribusi sebesar 0,72 % dan berkontribusi paling tinggi di tahun 2006 sebesar 0,79 %.
- b. Pengaruh Dana Alokasi umum terhadap Belanja Daerah tidak lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) $(0.039) < \alpha (0.05)$ dan Dana Alokasi Umum (DAU) $(0.030) < \alpha (0.05)$. Dengan kata lain Kabupaten Karangasem sudah mandiri dalam mendanai pelaksanaan pembangunan di daerahnya dan berhasil mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.
- c. Prediksi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah meningkat secara terus menerus dari tahun 2011 – 2015 yang secara langsung meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk lima tahun yang akan datang.

5.2 Saran

- a. Bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Karangasem sebaiknya melakukan perencanaan yang lebih tepat lagi di periode yang akan datang dalam menyusun anggaran belanja daerahnya agar lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan sumber – sumber penerimaan daerah dan semua pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah baik yang berasal dari transfer pemerintah pusat ataupun pendapatan asli daerah harus dapat digunakan dengan tepat sasaran sehingga dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya.
- b. Berkaitan dengan prediksi penerimaan sumber – sumber penerimaan daerah yang meningkat secara terus menerus untuk lima tahun yang akan datang (2011-2015) agar dapat menjadi acuan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran serta mengoptimalkan aset-aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Karangasem.

- c. Untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya, hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat membuat hasil analisis menjadi lebih akurat. Seperti, objek dan tempat penelitian sebaiknya dipilih menggunakan metode agar nilai validitas yang akan di uji mempunyai nilai akurasi yang diharapkan, jumlah dan jenis data yang sesuai standar teknik analisis yang digunakan, dan sebaiknya ditambahkan variabel lainnya dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah :

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Bogor: Salemba Empat.

Hastuti, Indhi. 2011. *Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)(Studi Pada Kota Dan Kabupaten Semarang)*". Tesis (tidak dipublikasikan). Semarang : Magister Akuntansi Undip.

Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, SNA IX, Padang 23-26 Agustus*.

Mardiasmo .2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta

Saputra, I Wayan Sucipta Adi. 2011. *Kontribusi sumber – Sumber Penerimaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Warmadewa Denpasar.

Sidik, Machfud, B. Raksasa Mahi, Robert Simantjuntak, & Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Widodo, Pambudi Tri. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi UMUM (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. (Studi pada Kabupaten/Kota di Bali)*. Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Yogyakarta : FE UII.

Wirawan, Nata. 2002. *Statistik Ekonomi 2*. Denpasar: Keramas Emas

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah